

## **PEDOMAN REPLIKASI INOVASI PROFIT M-TECH**

### **A. Latar Belakang Profit M-Tech**

Program ini mulai diimplementasikan tahun 2017 memanfaatkan dari dana CUKAI yang dikelola oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Madiun. Karena respon yang baik oleh masyarakat program Profit M-Tech tetap dilanjutkan hingga saat ini. Melalui Profit M-Tech, Pemkot Madiun telah menyediakan infrastruktur yang sustainable dan dapat diakses oleh siapa saja tanpa terkecuali serta dapat mendorong hadirnya berbagai inovasi. Dapat dikatakan demikian karena, dengan adanya wifi gratis, masyarakat dapat menimba ilmu dan informasi dari internet tanpa perlu mengeluarkan biaya. Pelajar, pelaku UMKM, pengusaha, pekerja formal, sebagian besar memerlukan media online. Bahkan dapat dikatakan mendorong inovasi bagi munculnya industri kreatif/umkm baru. Di samping itu, Profit M-Tech juga mendukung percepatan transformasi digital, baik di lingkungan pemerintah kota maupun di tengah masyarakat. Dengan Profit M-Tech bisa dikembangkan juga pemanfaatan IoT untuk mempermudah tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik.

### **B. Cara Kerja Inovasi**

#### **1. Penyedia mampu menyediakan jangkauan jaringan wifi gratis**

Penyedia layanan harus memiliki kemampuan untuk menyediakan jaringan wifi yang dapat diakses secara gratis oleh masyarakat di wilayah yang ditentukan. Ini mencakup kemampuan teknis dan infrastruktur untuk mendistribusikan sinyal wifi secara luas dan konsisten.

#### **2. Penyedia menyediakan perangkat penunjang wifi gratis, seperti Access Point, Kabel Jaringan dan sebagainya**

3. Penyedia harus menyuplai semua perangkat keras yang diperlukan untuk mendukung jaringan wifi gratis, termasuk Access Point (AP), kabel jaringan,

switch, dan peralatan lainnya yang dibutuhkan untuk mengoperasikan jaringan wifi dengan optimal.

**4. Layanan Tenaga Teknis selama 7 Hari per minggu untuk laporan kendala atau pemasangan baru**

Penyedia harus menyediakan layanan teknis yang siap sedia selama tujuh hari dalam seminggu untuk menangani segala masalah yang muncul, termasuk laporan gangguan dan pemasangan baru. Ini memastikan bahwa jaringan tetap berfungsi dengan baik dan pengguna mendapatkan bantuan yang diperlukan kapan pun.

**5. SLA jaringan putus 99.9%**

Service Level Agreement (SLA) yang ditetapkan harus menjamin bahwa tingkat ketersediaan jaringan adalah 99.9%. Artinya, jaringan diharapkan hanya mengalami downtime maksimal 0.1% dari waktu operasional, memastikan ketersediaan yang tinggi dan keandalan layanan.

**6. Penyedia memiliki jaringan backup lebih dari 1 ISP**

Untuk memastikan kestabilan dan keandalan jaringan, penyedia harus memiliki koneksi cadangan dengan lebih dari satu Internet Service Provider (ISP). Ini bertujuan untuk mengurangi risiko downtime jika terjadi masalah dengan salah satu ISP.

**7. Perjanjian dengan penyedia harga restribusi per titik wifi**

Harus ada kesepakatan harga antara penyedia layanan dan Instansi terkait biaya yang dikenakan per titik wifi. Ini mencakup biaya instalasi, pemeliharaan, dan operasional lainnya.

#### **8. Landing page wifi gratis untuk pemutaran video iklan masyarakat**

Saat pengguna terhubung ke wifi gratis, masyarakat akan diarahkan ke halaman awal (landing page) yang menampilkan video iklan yang disampaikan ke masyarakat sehingga bisa digunakan sebagai media informasi atau edukasi.

#### **9. Penyedia bersedia memberikan pelayanan pembatasan Domain dan Port**

Penyedia layanan dapat mengimplementasikan pembatasan akses terhadap domain tertentu dan port tertentu sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan. Ini dapat digunakan untuk mengontrol jenis konten yang bisa diakses melalui jaringan wifi.

#### **10. Menyediakan Dashboard untuk monitoring Layanan Wifi Gratis**

Penyedia harus menyediakan dashboard atau panel kontrol yang memungkinkan pihak terkait untuk memantau kinerja dan status jaringan wifi gratis secara real-time. Dashboard ini akan menampilkan data terkait penggunaan jaringan, status perangkat, dan informasi lainnya yang dibutuhkan.

#### **11. Penyedia bersedia memberikan akses koneksi untuk peralatan Internet of Thing (IoT) Pemerintah Kota Madiun**

Penyedia harus memastikan bahwa jaringan wifi yang disediakan dapat mendukung konektivitas perangkat Internet of Things (IoT) yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Madiun. Ini mencakup sensor, kamera, dan perangkat IoT lainnya yang memerlukan akses internet.

#### **12. Lokasi Router BGP Wifi Gratis di Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Madiun**

Router Border Gateway Protocol (BGP) yang digunakan untuk mengelola dan mengarahkan lalu lintas jaringan wifi gratis harus ditempatkan di Dinas Komunikasi

dan Informatika Kota Madiun demi memastikan pengelolaan yang terpusat dan terkontrol.

### C. Dukungan Keberlanjutan Inovasi

Untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan dan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, Pemerintah Kota Madiun telah menetapkan 20 Paket Pekerjaan Strategis Kota Madiun Tahun 2023 melalui Keputusan Walikota Madiun Nomor 050-401.023/268/2022 tentang Paket Pekerjaan Strategis Pemerintah Kota Madiun Tahun Anggaran 2023. Salah satu di antara paket pekerjaan strategis tersebut adalah Pengadaan Internet Gratis untuk Masyarakat dengan Dinas Kominfo sebagai Perangkat Daerah Pengampu. Paket pekerjaan ini merupakan realisasi Profit M-Tech khususnya dari sisi infrastruktur dan jaringan internet, yang merupakan bagian utama dari inovasi Profit M-Tech. Keputusan Walikota tersebut menunjukkan kuatnya komitmen Pemerintah Kota Madiun untuk menjamin keberlangsungan dan keberlanjutan Profit M-Tech. Selain itu, pada tahun 2023 telah disusun Raperda Literasi Digital, dan Raperda Pemanfaatan TIK pada tahun 2024. Keduanya merupakan raperda inisiatif Dewan Legislatif. Penyusunan kedua raperda tersebut menunjukkan adanya kesamaan tujuan dan pandangan antara unsur eksekutif dan legislatif dalam penguatan pemanfaatan teknologi di Kota Madiun, yang bisa dijadikan payung hukum keberlanjutan Profit M-Tech.

Pada awal tahun 2024, secara kuantitas, titik wifi mengalami peningkatan sejumlah 3150 dan dari sisi pemanfaatannya juga mengalami pengembangan dari tahun sebelumnya. Antara lain untuk *data analysis crowd detection* untuk menganalisa jumlah wisatawan di PSC, *analysis vehicle detection* untuk menganalisa kepadatan kendaraan yang keluar masuk Kota Madiun, dan juga mendukung *smart waste bin* untuk pemantauan kapasitas kontainer sampah dan kondisi sampah di TPS.

Selain penguatan infrastruktur dan sarana prasarana, langkah-langkah strategis juga dilakukan untuk meningkatkan kompetensi SDM baik dari internal Pemerintah Kota Madiun maupun dari masyarakat di bidang TIK. Misalnya melalui pelatihan–pelatihan teknis terkait pengembangan sistem pemerintahan berbasis elektronik, pelatihan kompetensi bidang TIK baik yang diselenggarakan oleh Pemkot atau Kemkominfo maupun lembaga pelatihan swasta. Disamping itu, Dinas Kominfo juga melaksanakan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat dengan melibatkan unsur masyarakat itu sendiri misalnya Relawan TIK, KIM, sekolah, PKK dan masyarakat secara umum.

## D. Mekanisme Replikasi Inovasi ke Instansi Lain



Gambar Alur Mekanisme Replikasi Inovasi

### Persiapan

1. Instansi mengirimkan surat permohonan studi tiru inovasi kepada Pemerintah Kota Madiun.
2. Instansi terkait melakukan kunjungan studi tiru ke Pemerintah Kota Madiun untuk mendiskusikan kebutuhan penerapan inovasi.

### Dokumen Replikasi

1. Instansi pemohon membuat dokumen Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang melibatkan pihak-pihak terkait inovasi.
2. Pemerintah Kota Madiun menyerahkan dokumen pendukung untuk membantu kebutuhan yang perlu dipersiapkan oleh instansi dalam proses implementasi inovasi.

### Implementasi

1. Instansi pemohon mempersiapkan infrastruktur inovasi untuk penerapan program inovasi.
2. Pemerintah Kota Madiun melaksanakan sosialisasi dan pelatihan kepada instansi pemohon tentang tata cara menjalankan program inovasi.

3. Implementasi inovasi dilakukan di instansi terkait sesuai kebutuhan dan hasil diskusi dengan Pemerintah Kota Madiun.

### **Evaluasi**

1. Pemerintah Kota Madiun dan instansi pemohon replikasi melakukan evaluasi terhadap implementasi program inovasi yang telah direplikasi.